

Tata Kelola Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Cianjur

Fira Putri Renggani¹, Irma Purnamasari²

¹²Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Djuanda Bogor. Jl. Tol Ciawi No.1 Kode Pos 16720

*Korespondensi: rengganifira@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Jalan memiliki peranan penting dalam dalam menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan dan perbaikan jalan merupakan tugas pemerintah. Tujuan penelitian ini guna mengetahui alur/tahapan serta pengadministrasian dalam proyek pembangunan jalan. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka/pengumpulan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUTR Kabupaten Cianjur merupakan instansi pemerintah yang membantu Bupati Cianjur dalam pengelolaan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang wilayah Cianjur. Salah satu tugas Dinas PUTR Kabupaten Cianjur yaitu bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan wilayah Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci: Proyek, Jalan, PUTR.

PENDAHULUAN

Jalan adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat di suatu daerah untuk memajukan pembangunan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Fungsi utama jalan adalah untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Jalan merupakan fasilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu wilayah di Indonesia Kabupaten Cianjur memiliki fasilitas jalan yang sering

digunakan oleh masyarakat kabupaten Cianjur untuk menunjang perekonomian dan mempermudah masyarakat dalam berkegiatan. (RI, 2006)

Pembangunan infrastruktur Jalan dan penataan ruang merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Instansi Pemerintahan yang melaksanakan dan mengatur proyek pembangunan jalan yaitu Dinas PUTR. Dinas PUTR sebagai salah satu institusi pemerintah Kabupaten Cianjur, yang memegang peran dalam mewujudkan hal tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatannya. Dinas PUTR merupakan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian (PUPR).(Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, 2021).

Salah satu tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten Cianjur adalah melaksanakan program penyelenggaraan jalan melalui Dinas PUTR. Menurut peraturan bupati nomor 60 tahun 2016 (peraturan B. Cianjur, 2016), membahas mengenai posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di pemerintahan kabupaten Cianjur. Dinas PUTR Kabupaten Cianjur dipimpin oleh kepala dinas, yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. (D. P. Cianjur, 2024)

Menurut Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021, Dinas PUTR ditugaskan untuk membantu Bupati dalam memngatur urusan pemerintahan disuatu daerah. Peraturan ini menjelaskan posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Cianjur. Selain itu, Dinas PUTR ditugaskan untuk membantu dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (D. P. K. Cianjur, 2024).

Dinas PUTR Kabupaten Cianjur melaksanakan proyek pembangunan jalan diseluruh Wilayah Kabupaten Cianjur. Dinas PUTR melalukan beberapa alur seperti perencanaan dan pelaksanaan ketika akan mengerjakan suatu proyek pembangunan jalan, pada pelaksanaan terdapat beberapa alur/tahapan yang

harus dilewati. Oleh karena itu artikel ini membahas tentang alur/tahapan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan pada Dinas PUTR Kabupaten Cianjur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ¹studi pustaka, yang merupakan kegiatan pengambilan data dari buku, peraturan dan sumber internet dari penelitian sebelumnya untuk membangun teori dasar tentang masalah yang akan diteliti, ²wawancara, merupakan kegiatan memberikan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan kebutuhan data yang akan diteliti, dan ³dokumentasi, merupakan kegiatan mengambil gambar ditempat yang diteliti sesuai dengan kebutuhan data. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada pegawai Dinas PUTR kabupaten Cianjur beserta dengan dokumentasinya dan mencari literatur ilmiah mengenai "Tata Kelola Pemerintahan" dan "Proyek pembangunan jalan" dimana data tersebut dapat menjadi teori pendukung bagi pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator good governance, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (Pemerintahan RI, 2000). Meliputi; a. Akuntabilitas; b. Transparansi; c. Pelayanan prima; d. Demokrasi dan partisipasi masyarakat; e. Efisiensi dan efektivitas; f. Supremasi hukum. Oleh karena itu Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus saling bekerjasama, mendukung, dan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dari hasil analisa selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) konsep Good Governance terimplementasikan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan, pada kasus ini pemerintah mewadahi dan mengelola

anggaran dalam proyek pembangunan jalan, kemudian pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan serta masyarakat yang menerima manfaat dan berpartisipasi dalam memelihara fisik jalan. Kolaborasi yang terjalin antara instansi dan pihak swasta dapat meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat dapat melihat sejauh mana akuntabilitas yang dibangun oleh pemerintahan. (Irma, Suryaningsih, Rita, Faisal, Cecep, Virly, 2024)

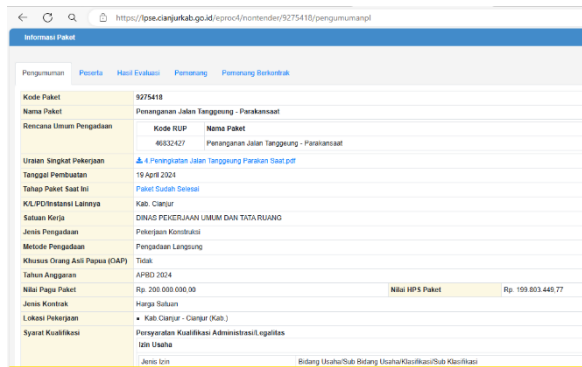
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rian Hafits Jati Permana, ST. selaku Analis Jalan Jembatan Dinas PUTR Kabupaten Cianjur dan Bapak Rizal Ardhi Prasetyo, SE. selaku Pelaksana Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUTR Kabupaten Cianjur terdapat beberapa tahapan pelaksanaan dalam menjalankan proyek pembangunan jalan. Berikut Tahapan Pelaksanaan proyek pembangunan jalan Dinas PUTR Kabupaten Cianjur: 1. Membuat Surat Permohonan Barjas (Barang dan Jasa), dalam pembuatan surat permohonan Barjas terdapat beberapa perencanaan yang disusun guna menjadi lampiran penudukung surat seperti; Gambar Perincian, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), SPEKTEK (Spesifikasi Teknis), rancangan kontrak dan uraian pekerjaan. Pada tahapan ini semua lampiran yang dibutuhkan dibuat/dirancang oleh Tim Perencanaan Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, yang kemudian di upload dilaman LPSE.Cianjur; 2. Proses Tender dan Penandatanganan Kontrak, dalam proses tender PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Bapak Wisnu Ardianto, ST, MT, M. Sc selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUTR Kabupaten Cianjur menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)/ penunjukan pihak yang memenangkan tender (kontraktor), kemudian SPPBJ tersebut diserahkan kepada pihak Bank BJB, lalu pihak bank mengeluarkan Garansi Bank sebagai Jaminan pelaksanaan yang nantinya menjadi syarat dalam penandatanganan kontrak; 3. Rapat PCM (Pre Construction Meeting), adalah rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan pihak-pihak terkait

seperti pihak penyedia barang/jasa, PPK, PPTK, konsultan pengawas dan wakil direksi. Rapat PCM bertujuan untuk menyatukan pengertian terhadap seluruh dokumen kontrak dan membahas mengenai schedule pelaksanaan pekerjaan dilapangan; 4. FE (Field Engineering), merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara desain awal yang ditampilkan dalam gambar dengan kondisi aktual di lapangan. Kegiatan ini meliputi survei lapangan dan analisis hasil survei tersebut. Penyedia jasa diharuskan untuk menyediakan tenaga ahli yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan rekayasa lapangan ini; 5. Proses Pelaksanaan, pada tahap inilah proses konstruksi dilakukan, mulai dari membuat pondasi, tembok, dan lain sebagainya. Pada proses pelaksanaan, konsultan pengawas akan mengawasi proses sesuai waktu, biaya, dan standar atau mutu yang disepakati sebelumnya. Tahap pelaksanaan bertujuan untuk merealisasikan design sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati diawal; 6. Pencairan, dalam tahapan pencairan biasanya terbagi menjadi dua waktu pencairan, pada pencairan pertama pihak penyedia barang/jasa akan menerima anggaran sebesar 95% dari nilai kontrak yang telah disepakati. Anggaran direncanakan oleh Bidang Perencanaan Program yang berkoordinasi dengan Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUTR Kabupaten Cianjur; 7. PHO (Provisional Hand Over), adalah proses penyerahan pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK atau pemilik proyek setelah fisik/jalan selesai 100%. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek telah memenuhi standar yang ditetapkan. (Indonesia, 2018); 8. Masa Pemeliharaan & FHO (Final Hand Over), penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menjaga kondisi hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, yang mencakup 180 hari kalender setelah pelaksanaan PHO. Pada saat pemeliharaan PPK melakukan pembayaran sebesar 5% yang merupakan jaminan pemeliharaan selama masa pemeliharaan. (PERUMAHAN & MARGA, 2022). Dari hasil analisa dalam tahapan proyek

pembangunan jalan pada Dinas PUTR Kabupaten Cianjur indikator good governance yang telah terimplementasikan dalam kegiatan proyek pembangunan yaitu:

➤ **Transparan**

Dalam hal ini Dinas PUTR Kabupaten Cianjur membuat laman web LPSE.Cinajur yang bertujuan agar masyarakat Cianjur dapat mengakses informasi mengenai proyek pembanguna jalan seperti, anggaran yang digunakan, perusahaan yang melaksanakan proyek, dan wilayah mana yang akan diperbaiki.



➤ **Partisipasi Masyarakat**

Setelah pelaksanaan proyek pembangunan telah mencapai fisik 100% dan selesai, maka masyarakat Cianjur ikut berpartisipasi dengan menjaga dan memelihara jalan yang telah diperbaiki oleh Dinas PUTR Kabupaten Cianjur.

Indikator partisipasi masyarakat yang yang diimplementasikan yaitu partisipasi sosial (Fidya, Alifa, Angeli, Heri, 2023), dimana masyarakat wilayah Cianjur sepakat untuk bergotong royong dalam menjaga dan memelihara jalan yang sudah diperbaiki.

➤ **Efisiensi dan Efektifitas**

Efisiensi dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan sudah sangat efisien proyek dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya serta peralatan dan perlengkapan yang memadai dan dapat

menunjang pelaksanaan proyek, sehingga efektivitas penyelesaian pelaksanaan proyek pembangunan jalan tepat waktu dan dapat digunakan oleh masyarakat Cianjur.

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis diberi tugas untuk memastikan dan mengecek kelengkapan berkas pengadministrasian (Purnamasari et al., 2024) baik administrasi yang dikeluarkan oleh bidang pembangunan jalan maupun dari pihak kontraktor, berkas – berkas administrasi yang harus terlampirkan yaitu:

1. SPK (Surat Perintah Kerja) adalah surat resmi yang mengandung pernyataan dan instruksi untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan tertentu. sehingga isi surat perintah kerja lebih menekankan pada kepastian waktu dan nilai pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penerima perintah kerja. isi dari surat ini mencakup informasi tentang siapa yang mengeluarkan perintah, kepada siapa perintah itu diberikan, tanggal mulai dan batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai atau biaya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan konsekuensi dari tidak menyelesaikannya.
2. Syarat Umum, persyaratan kontrak dalam proyek pembangunan jalan memuat beberapa hal diantaranya; lingkup pekerjaan, hukum yang berlaku dalam pelaksanaan proyek, larangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang serta penipuan. Dalam persyaratan umum juga memuat tentang harga kontrak, hak dan kewajiban penyedia. Hak dan kewajiban pengguna jasa, perpajakan, masa pelaksanaan kontrak, perlindungan tenaga kerja, pengawasan dan pemeriksaan mutu, laporan hasil pekerjaan, serah terima pekerjaan, masa pemeliharaan dan serah terima kahir pekerjaan;

3. Foto Visual FE (Field Engineering), dalam penyusunan berkas kontrak salah satu berkas yang harus dilampirkan yaitu foto visual FE atau foto kegiatan pihak penyedia jasa dan pihak PUTR yang sedang melakukan survei dan pengukuran jalan sebelum pelaksanaan proyek berlangsung. Foto FE juga dilampirkan sebagai bukti fisik sebelum jalan diperbaiki;
4. Foto Visual PHO menjadi salah satu berkas yang harus dilampirkan dalam penyusunan kontrak. Foto visual PHO merupakan foto kegiatan penyerahan pekerjaan sementara dari kontraktor/penyedia barang dan jasa kepada PPK atau pemilik proyek setelah fisik/jalan selesai 100%;
5. Berkas dari POKJA/Penyedia Barang dan jasa, pihak kontraktor/Penyedia barang dan jasa membuat dan menyerahkan berkas atau dokumen hasil pemilihan barang dan jasa, dalam berkas tersebut terdapat kelengkapan dokumen yang dilampirkan yaitu; laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa, berita acara hasil pemilihan, berita acara hasil negosiasi teknis dan harga, berita acara pembuktian kualifikasi, berita acara evaluasi penawaran, dokumen penawaran serta company profile;
6. SPEKTEK (Spesifikasi Teknis), dalam dokumen spesifikasi teknis memuat beberapa informasi seperti; latar belakang, maksud dan tujuan, target/sasaran, organisasi pengadaan barang/jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, ruang lingkup dan lokasi pekerjaan, pekerjaan utama, personil pelaksanaan kontruksi, peralatan pekerjaan kontruksi, jangka waktu pelaksanaan, keluaran produk yang dihasilkan, metode pelaksanaan, spesifikasi proses/kegiatan, dan surat kerjasama yang diperluka (apabila peralatan bukan milik sendiri/sewa);
7. Gambar Perencanaan, merupakan gambar kerja yang memuat rencana teknis sebuah bangunan secara umum hingga detail. Gambar ini, yang juga dikenal sebagai as plan drawing dan disusun oleh konsultan perencana.

KESIMPULAN

Jalan merupakan fasilitas publik yang menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Prasarana jalan khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur berperan sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Cianjur, dengan adanya prasarana jalan yang baik dapat menunjang kegiatan masyarakat, dan dapat memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Pada saat ini proyek pembangunan jalan tengah berlangsung di beberapa wilayah Cianjur terutama di wilayah Cianjur Selatan. Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kabupaten Cianjur merupakan instansi pemerintah yang membantu Bupati Cianjur dalam pengelolaan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang wilayah Cianjur. Salah satu tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur yaitu bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam proses pembangunan jalan terdapat alur / tahapan pelaksanaan yang harus dilalui yaitu; membuat surat permohonan barang dan jasa, proses tender, rapat PCM (Pre Construction Meeting), FE (Field Engineering), proses pelaksanaan (dimulainya pekerjaan oleh kontraktor/penyedia barang dan jasa dilapangan), pencairan termin pertama, PHO ((Provisional Hand Over), pencairan termin kedua, dan terakhir masa pemeliharaan (dilakukan oleh pihak kontraktor/penyedia barang dan jasa).

Jalan yang rusak dan membutuhkan perbaikan akan disurvei dan didata oleh bidang BINTEK (Bimbingan Teknis) untuk dianalisa dan dibuat perencanaan oleh bidang perencanaan program Dinas PUTR Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan proyek pembangunan jalan memerlukan perencanaan yang detail dan proses pelaksanaan yang cukup memakan waktu. Dalam perencanaan proyek pembangunan jalan diperlukan rencana dan administrasi yang harus dilampirkan yaitu; Gambar perincian, HPS (Harga Perkiraan Sementara),

SPEKTEK (Spesifikasi Teknis), rancangan kontrak dan uraian pekerjaan (bagi penyedia barang/jasa). ((Provisional Hand Over), pencairan termin kedua, dan terakhir masa pemeliharaan (dilakukan oleh pihak kontraktor/penyedia barang dan jasa).

REFERENSI

- Cianjur, D. P. (2024). Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2021-2026. In \.
- Cianjur, D. P. K. (2024). *Sejarah Dinas PUTR Kabupaten Cianjur*.
<https://putr.cianjurkab.go.id/halaman/profil/sejarah>
- Fidya, Alifa, Angeli, Heri, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan. *Karimah Tauhid*, 2.
- Indonesia, R. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Pemerintah Republik Indonesia*, 22 Maret 2018. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>
- Irma, Suryaningsih, Rita, Faisal, Cecep, Virly, O. (2024). Kolaborasi antar Intansi Bappeda Litbang Dengan Sekretariat Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabiloitas. *Karimah Tauhid*, 3.
- Pemerintahan RI. (2000). PP No 101 Tahun 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- PERUMAHAN, K. P. U. D., & MARGA, D. J. B. (2022). *STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN FISIK*

(PEKERJAAN KONSTRUKSI).

<https://binamarga.pu.go.id/uploads/files/1526/sopupmdjbm-119-revisi-01-tentang-serah-terima-hasil-pekerjaan-fisik-pekerjaan-konstruksi.pdf>

Purnamasari, I., Saraswati, A., Pratidina, G., Seran, G. G., & Data. (2024).

Pengadministrasian Di Bagian Teknis dan Data Di KPU. *Karimah Tauhid*, 3.

Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, K. P. (2021). *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2021*. Kementerian PUPR.

<https://data.pu.go.id/buku-informasi-statistik-infrastruktur-pupr-tahun-2021>

RI, P. P. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jalan (

Undang-Undang No. 34 Tahun 2006). *Undang - Undang Republik Indonesia No. 34*.